



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
Tahun 2018**

**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekalongan**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2018**

**DPM-PTSP**

Jl. Majapahit No. 1 Pekalongan

☎ (0285) 432086 Fax. 0285 420428

website : [www.oss.pekalongankota.go.id](http://www.oss.pekalongankota.go.id)

e-mail : [oss@pekalongankota.go.id](mailto:oss@pekalongankota.go.id)

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP)  
TAHUN 2018**

# ***K***ata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga sebagai sarana pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan pasal 14, 27 dan 30 perpres tersebut menggunakan petunjuk teknis Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

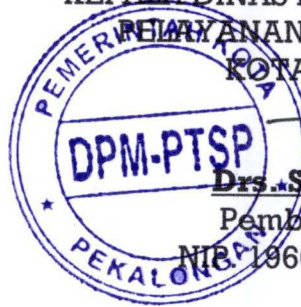
Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bisa melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan selama Tahun 2018 serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.



Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan sangat kami harapkan.

Pekalongan, Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEKALONGAN



**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

# Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Ikhtisar Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)</b>	iii
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>
	A. Gambaran Umum dan Sejarah Organisasi
	B. Sumber Daya Aparatur
<b>Bab II</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>
<b>Bab III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>
	A. Capaian Kinerja DPM-PTSP
	B. Realisasi Anggaran
<b>Bab IV</b>	<b>Penutup</b>
<b>Lampiran</b>	
	Perjanjian Kinerja Perubahan 2018
	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan 2018

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

*(Executive Summary)*

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan telah melaksanakan 3 (tiga) program strategis dan 6 (enam) program penunjang yang dijabarkan dalam 38 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan telah mengalokasikan pembiayaan Total Belanja sebesar Rp. 5.152.796.000,00 terbagi dalam 2 (dua) jenis rekening belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.738.855.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.413.941.000,00. Belanja Tidak Langsung (BTL) dialokasikan untuk Gaji Tunjangan dan Jaminan Pegawai sedangkan Belanja Langsung (BL) dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan mendukung Visi dan Misi Walikota Pekalongan pada Tahun 2018.



## BAB I

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus tetap mengedepankan peraturan-peraturan yang ada sejalan dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Oleh karena itu setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan juga merupakan jawaban tentang aktualisasi pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Isu strategis yang diangkat dari permasalahan keterbatasan lahan dan belum optimalnya layanan perizinan usaha dan penanaman modal merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan, diprioritaskan dan dipecahkan dengan **upaya peningkatan kemudahan layanan perizinan dan penanaman modal** guna mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal.

#### A. GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH ORGANISASI

##### Unit Pelayanan Terpadu (UPT)



Kantor UPT (kiri) dan pelayanan perizinan (kanan) Tahun 2005

Derasnya arus reformasi telah mendorong terjadinya perubahan di berbagai sektor. Demikian juga di sektor pelayanan publik. Masyarakat



menuntut adanya perubahan kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik. Selain itu pada saat pelantikannya, Walikota Pekalongan mendapat amanat dari Gubernur Jawa Tengah untuk membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu.

Menyikapi hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pekalongan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Unit Pelayanan Terpadu yang secara resmi mulai operasional pada tanggal 1 Nopember 2005 dan menempati kantor di Jl. Majapahit No. 8 Pekalongan.

Dengan personil sebanyak 18 orang dan dipimpin oleh seorang koordinator, UPT melayani 14 jenis perizinan dan non perizinan. Kewenangan itu didasari atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503 / 0478 Tahun 2006 tentang Pencabutan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan di Bidang Perizinan. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, UPT berusaha menjadi awal perubahan paradigma pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.

### **Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM)**



Pegawai DPTPM (kiri) dan pelayanan perizinan DPTPM (kanan) Tahun 2008

Dengan adanya UPT ini masih dirasa belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu penambahan unsur pengaduan dan pengawasan serta penanaman modal, perlu diikuti dengan adanya lembaga yang lebih mapan dan mampu untuk mengelola



kewenangan yang harus ditangani. Sehingga pada tanggal 13 Nopember 2006 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006 yang menjadi dasar pembentukan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM) Kota Pekalongan. Adapun pengisian personil DPTPM baru dapat dilaksanakan pada Bulan April tahun 2007.

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503 / 468 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kota Pekalongan kepada Kepala DPTPM, maka pelayanan perizinan yang dikelola DPTPM ditingkatkan dari 14 menjadi 28 jenis perizinan dan non perizinan. Dengan Keputusan Walikota itu pula, maka penandatanganan perizinan dapat dilakukan oleh Kepala DPTPM, sehingga dapat mempercepat proses pelayanan. Selanjutnya dengan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503 / 980 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kota Pekalongan kepada Kepala DPTPM, perizinan dan non perizinan yang dikelola DPTPM bertambah menjadi 32 jenis.

### **Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)**



Kantor BPPT (kiri) dan pelayanan perizinan BPPT (kanan) Tahun 2009

Dengan diterbitkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekalongan. Sesuai dengan PP tersebut maka bentuk lembaga untuk pelayanan terpadu satu pintu adalah berupa Badan, sehingga DPTPM diubah menjadi BPPT. Secara efektif perubahan itu mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2009. Untuk lebih meningkatkan kenyamanan



masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka mulai akhir April 2009 BPPT dipindahkan dari kantor lama di Jl. Majapahit No. 8 ke kantor baru di Jl. Majapahit No. 1. Sedangkan untuk peresmian kantor BPPT baru dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2009.

### **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Penanaman Modal merupakan salah satu urusan yang mejadi kewenangan daerah. Selama ini pelaksanaan urusan ini hanya dilekatkan pada salah satu Dinas/Badan yang ada. Dengan adanya Intruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang salah satu prioritasnya adalah iklim investasi dan iklim usaha mengamankan pelaksanaan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal, maka urusan penanam modal sekarang tidak cukup hanya dilekatkan pada salah satu Dinas/Badan, namun sudah semestinya menjadi satu badan yang berdiri sendiri yang didalamnya memiliki fungsi-fungsi penanaman modal.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Memang tidak semua urusan pemerintahan akan dibentuk dalam suatu organisasi tersendiri, namun mengingat urusan penanaman modal cukup strategis, maka pada Pemerintah Kota Pekalongan memandang perlu untuk mengubah susunan organisasi pelaksana penanaman modal dari semula Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Restrukturisasi organisasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23

tahun 2011 tentang Tugas dan fungsi Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan, sedangkan untuk realisasi perubahan organisasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 2011. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan disingkat BPMP2T merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai fungsi kewenangan di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan. Melayani 36 jenis izin.

### **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Pegawai DPMP2TSP Tahun 2016

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) merupakan bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

DPMP2TSP dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan,



Keberadaan DPMPTSP merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka reformasi birokrasi di Kota Pekalongan, melalui perubahan paradigma dari pemerintah sebagai penguasa menjadi pemerintah sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima sehingga masyarakat merasa mudah, nyaman dan tenang dalam mengurus perizinannya.

DPMPTSP merupakan metamorfosis dari Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekalongan, dimana sebelumnya berbentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pada tahun 2005 kemudian menjadi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM) pada tahun 2008 kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2009 dan pada tahun 2009 sampai dengan 2016 berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan pada akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

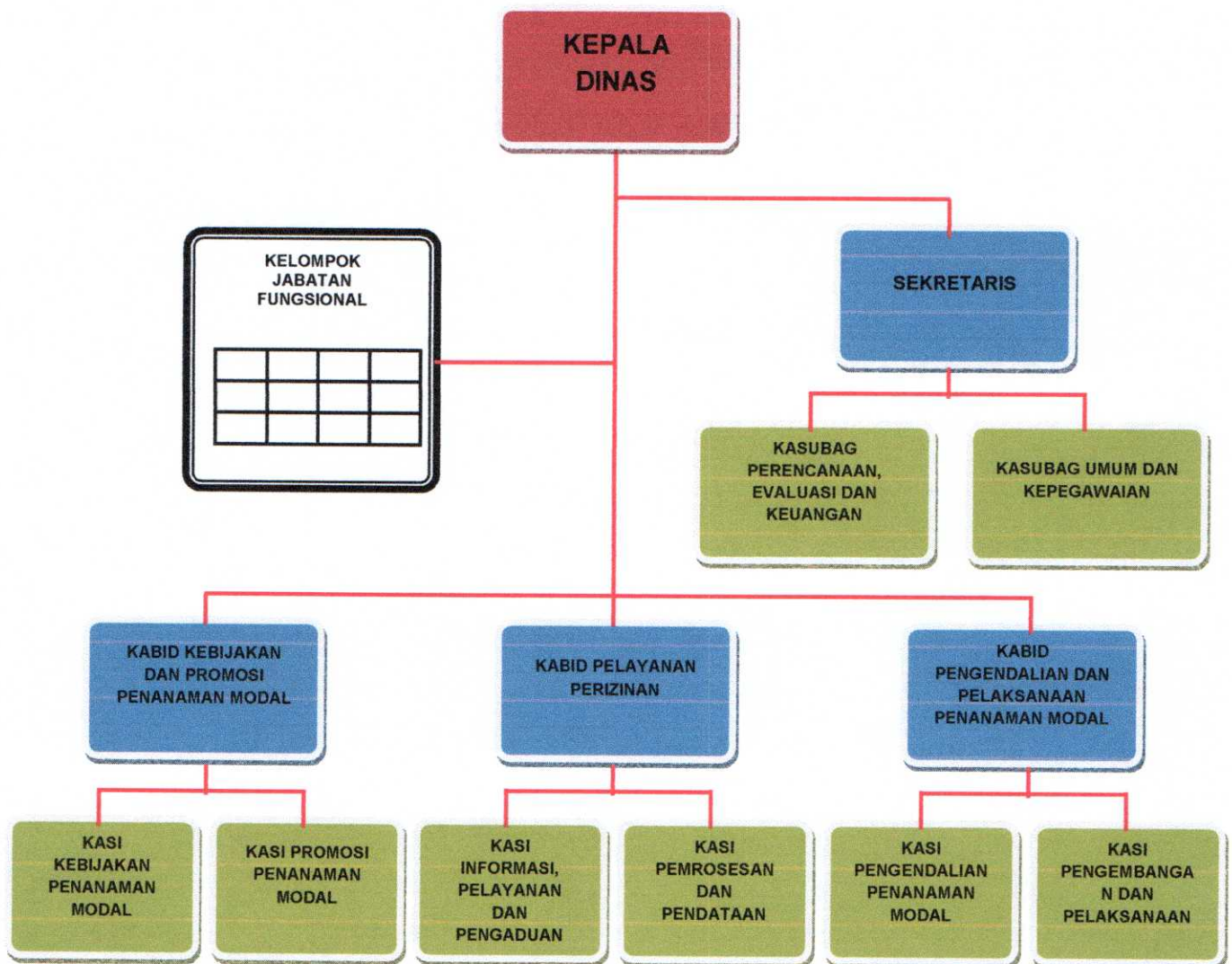
Sejalan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut DPM-PTSP dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

DPM-PTSP mengemban Visi “Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi Daerah Melalui Pelayanan Prima”.

Dalam mencapai Visi tersebut melalui Misi : Meningkatkan kualitas kebijakan, promosi, Fasilitasi, Kerjasama, Pelayanan, Pengendalian, Pelaksanaan Pengembangan, Pengolahan data dan Sistem Informasi dan penyebaran informasi penanaman modal berbasis Teknologi Informasi untuk menumbuh kembangkan iklim usaha di Kota Pekalongan. Dengan Bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**Gambar 1.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA PEKALONGAN**





Berdasar Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, bahwa DPM-PTSP mempunyai tugas " membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ".

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPSTSP Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

- (1) Penetapan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (2) Pengkoordinasian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (3) Pengkoordinasian tugas dibidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (4) Pengkoordinasian fasilitasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (5) Memimpin pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- (6) Memimpin dan Pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau, Standar Pelayanan (SP);
- (7) Memimpin, pengkoordinasian dan memvalidasi pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan Tahun 2018 mempunyai pegawai sebanyak orang, yaitu 13 orang dengan jabatan struktural dan 14 orang jabatan non struktural/fungsional umum, dengan struktur sebagai berikut :

### B.1. Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Unit	Jumlah orang	%
Kepala Dinas	1	4%
Sekretariat	8	31%
Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal	4	15%
Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	4	15%
Bidang Pelayanan Perizinan	7	27%
Jabatan Fungsional	-	0%
<b>Jumlah Total</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

### B.2. Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	II.B	1
2.	III.A	1
3.	III.B	3
3.	IV.A	8
	<b>Jumlah Total</b>	<b>13</b>



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan Periode 2016-2021 yang menargetkan sasaran strategis :

- A. Target Perjanjian Kinerja / Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
- Sasaran strategis yang hendak dicapai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan perizinan usaha atau meningkatnya investasi	Persentase capaian nilai investasi sebesar 1.188,53 Milyar rupiah pada tahun 2021  (dalam milyar rupiah)	83,44%  991.76

- B. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2018

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja

daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Daerah pada dasarnya adalah sebuah alat untuk mengukur suatu kondisi tertentu. Pelaksanaan pembangunan mempunyai dampak yang sangat kompleks, baik dampak tersebut secara langsung oleh suatu upaya pembangunan, ataupun dampak tersebut muncul dalam sebuah hubungan sistem yang saling terkait dan bersinergi. Kondisi makro ekonomi seperti halnya pertumbuhan ekonomi, selain dipengaruhi oleh upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, juga dipengaruhi oleh sektor-sektor pembangunan lain yang diselenggarakan oleh masyarakat, dunia usaha, ataupun dunia industri. Namun demikian, indikator pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung.

Dengan pertimbangan tersebut, maka terdapat dua kategori indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan masa jabatan Tahun 2016-2021. Kedua indikator tersebut, adalah indikator makro dan indikator sasaran pencapaian Misi. Indikator Kinerja yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) termasuk dalam Aspek Daya Saing Daerah dengan Indikator Kinerja Pembangunan Jumlah Nilai Investasi yang akan dicapai pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2021, secara rinci target dan capaiannya digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :



ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONSISI AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	795,000	860,588	926,175	991,763	1.057,350	1.122,938	1.188,525	1.188,525

Untuk mencapai sasaran utama tersebut diatas di laksanakan dengan 3 (tiga) program strategis dan 6 (enam) program penunjang. Program strategisnya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini menitikberatkan pada peningkatan pemasaran produk unggulan dan investasi di pekalongan, dijabarkan dalam kegiatan:

- a. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Penyelenggaraan pameran investasi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini menitikberatkan pada peningkatan iklim investasi melalui pelayanan prima dalam bidang penanaman modal dan kegiatan pendukungnya, dijabarkan dalam kegiatan:

- a. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
- b. Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
- c. Aplikasi SIMPADU
- d. Pengelolaan Website OSS
- e. Pengelolaan SPIPISE
- f. Audit Standar ISO 9000

- g. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
  - h. Klinik LKPM
  - i. Fasilitasi Pengaduan perizinan dan Non Perizinan
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
- Program ini menitikberatkan pada peningkatan iklim investasi melalui buku profil peluang investasi di Kota Pekalongan, dijabarkan dalam kegiatan:
- a. Penyusunan Profil Investasi Kota Pekalongan



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab II telah disajikan rencana kinerja sekaligus target-target keseluruhan yang akan diwujudkan sampai dengan akhir 2018, setelah keseluruhan program kegiatan selesai dilaksanakan, pada Bab ini, target-target tersebut akan dilihat, apakah sudah dapat tercapai dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capaian target tersebut dan berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai target sasaran tersebut.

#### **A. CAPAIAN KINERJA DPM-PTSP**

##### **1. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018**

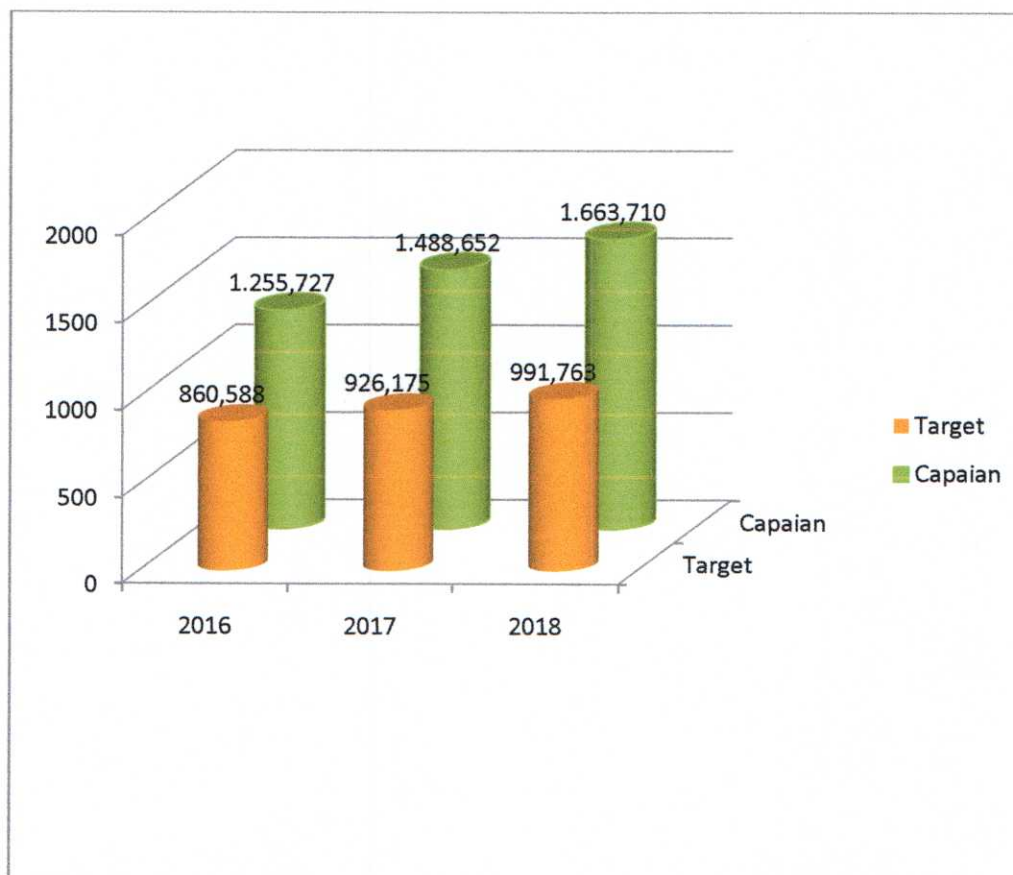
Pada Bab II telah disajikan rencana kinerja sekaligus target yang akan diwujudkan sampai dengan akhir 2018, setelah keseluruhan program kegiatan selesai dilaksanakan, pada Bab ini, target-target tersebut akan dilihat, apakah sudah dapat tercapai dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capaian target tersebut yang telah diurutkan berdasarkan prioritas yang terpenting.

**Sasaran** : Meningkatnya layanan perizinan usaha atau meningkatnya investasi.

Pengukuran sasaran diatas menggunakan indikator Persentase capaian target investasi sebesar 83,44% dari target investasi di akhir tahun 2021 sebesar 1.188,53 milyar rupiah atau 991.76 milyar rupiah.

**Capaian** : Akumulasi capaian investasi di Kota Pekalongan untuk sampai dengan 31 Desember 2018 sejumlah 1.663,71 milyar rupiah atau 139,98% dari target 2021.

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Investasi**  
**Tahun 2016-2018**



Grafik diatas menunjukkan akumulasi capaian investasi pada tahun 2018 yang sebesar 1.663,71 milyar rupiah karena ada investasi yang masuk sebesar 175,15 milyar rupiah dari 202 proyek perusahaan sepanjang tahun 2018 ini. Investasi ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.351 orang tenaga kerja. Data terperinci dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :



**Tabel 3.1**  
**Realisasi Perbulan Investasi Tahun 2018**

2018	TOTAL PENANAMAN MODAL (PMDN + PMA)		
	JUMLAH PERUSAHAAN	NILAI INVESTASI (Rp.)	JUMLAH TENAGA KERJA
	(5)	(6)	(7)
Januari	21	8.404.000.000,00	106
Februari	30	11.983.500.000,00	166
Maret	21	8.639.250.000,00	87
April	27	14.571.100.000,00	187
Mei	15	80.558.500.000,00	140
Juni	2	7.500.000.000,00	9
Juli	13	3.664.800.000,00	45
Agustus	20	11.379.360.000,00	231
September	16	6.150.000.000,00	77
Oktober	14	3.644.600.000,00	45
Nopember	13	4.365.600.000,00	40
Desember	10	14.290.000.000,00	218
	202	175.150.710.000,00	1351

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sektor perdagangan dan reparasi mendominasi dalam realisasi investasi dan selanjutnya sektor jasa lain tersier, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, sektor hotel dan restoran, sektor industri kimia dan farmasi, sektor industri kimia sekunder dan sektor konstruksi.

Tahun 2018 tercatat data investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Non PMA/PMDN yakni menambah nilai investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 175.150.710.000 adalah dari sektor Industri Kimia dan Farmasi (Chemical And Pharmaceutical Industry), Industri Lainnya (Other Industry) Konstruksi (Construction), Perdagangan dan Reparasi (Trade & Repair),

Hotel dan Restoran (Hotel & Restaurant), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Real Estate, Ind. Estate) dan Jasa lainnya (Other Services) dan 202 Unit Usaha.

#### a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Penanaman Modal di Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (tiga) program yakni Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana, dan Prasarana Daerah yang terdistribusi dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) indikator yang mencapai target.

##### 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Capaian Indikator Program**  
**Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

No	Indikator Program	Target 2018		Capaian	Capaian
				2017	2018
1	Jumlah nilai investasi	991,76	Rp (Juta)	1.488,56	1.663,71

Capaian Akumulasi Investasi sebesar 1.663,71 milyar rupiah pada 2018 dari target sebesar 992 milyar rupiah, karena terjadi penambahan 175,15 milyar rupiah dari realisasi 1.488,56 milyar rupiah tahun sebelumnya.

##### 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Target dan Capaian Indikator Program**  
**Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

No	Indikator Program	Target 2018		Capaian	Capaian
				2017	2018
1	Jumlah nilai investasi)	991,76	Rp (Juta)	1.488,56	1.663,71

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi menggunakan indikator yang sama dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yaitu dengan Capaian Akumulasi Investasi sebesar 1.663,71 milyar rupiah pada 2018 dari target sebesar 992 milyar rupiah, karena terjadi penambahan 175,15 milyar rupiah dari realisasi 1.488,56 milyar rupiah pada tahun sebelumnya.

### 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target dan Capaian Indikator Program**  
**Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah**

No	Indikator Program	Target 2018		Capaian	Capaian
				2017	2018
1	Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi	3,00	informasi	3,00	3,00

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah tercapai 3 (tiga) indikator dari 3 (tiga) indikator yang ditargetkan.

## b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi diitujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 236.700.000,- melalui 3 (tiga) Kegiatan dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Target dan Capaian Kinerja Output pada**  
**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Capaian 2018
			Satuan	angka	
1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal	kali	1	1
2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah lokasi (usaha) terpantau	lokasi	65	65
3	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah promosi/pameran investasi	kali	2	2

Program ini didukung oleh Kegiatan Strategis yaitu Kegiatan Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar



dan Usaha Kecil Menengah yang diwujudkan dalam kerjasama temu bisnis UMKM dan UMB.



Foto : Fasilitasi Kerjasama UMKM dengan UMB

Selanjutnya Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.



Foto : Pemantauan dan Pembinaan usaha

Dan promosi investasi dan produk unggulan Kota Pekalongan melalui Pameran Investasi di Jawa dan Luar jawa.



Foto : Pameran Investasi

## 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 1.026.550.000,- melalui 9 (sembilan) Kegiatan dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Capaian 2018
			Satuan	angka	
1	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah peraturan penanaman modal tersusun	peraturan	2	2



No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Capaian
2	Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah laporan izin (sesuai SOP)	laporan	1	1
3	Aplikasi SIMPADU	Jumlah bulan Apl.SIMPADU terupdate	bulan	12	12
4	Pengelolaan Website OSS	Jumlah bulan pengelolaan website	bulan	12	12
5	Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	Jumlah bulan pengelolaan layanan SPIPISE	bulan	12	12
6	Audit Standar ISO 9000	Jumlah Audit ISO	kali	2	2
7	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Tesusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Dok.	2	2
8	Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/pendampingan LKPM	Perush.	65	65
9	Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan	Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan	persen	80	89

Ketercapaian Indikator Kinerja Output dari 9 (sembilan) kegiatan diatas didukung oleh Penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan informasi dan pengaduan. Transparansi dan kemudahan layanan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendukung iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan di DPMPTSP dinilai kategori Baik dan berdasarkan data pengaduan yang masuk

Pelaksanaan kegiatan pada program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, Dan Prasarana Daerah ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 45.000.000,- melalui 1 (satu) Kegiatan dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Target dan Capaian Kinerja Output pada**  
**Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, Dan**  
**Prasarana Daerah**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2018		Capaian 2018
			Satuan	angka	
1	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah Dokumen Profil investasi	Dokumen	1	1

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan 1 (satu) kegiatan pendukung yaitu penyusunan Profil Investasi Kota Pekalongan yang berisi data potensi dan peluang investasi dan produk unggulan yang diwujudkan dalam Buku, CD Website dan Video/Film.

## B. REALISASI ANGGARAN

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH / (KURANG)	
			JUMLAH (Rp)	%
2	3	6	7 = 6 - 3	8
<b>PENDAPATAN</b>	0,00	8.612.900,00	8.612.900,00	∞
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	8.612.900,00	8.612.900,00	∞
<b>BELANJA</b>	5.152.796.000,00	4.940.783.147,00	(212.012.853,00)	95,89
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.738.855.000,00	2.596.334.946,00	(142.520.054,00)	94,80
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.413.941.000,00	2.344.448.201,00	(69.492.799,00)	97,12
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	556.084.000,00	547.508.152,00	(8.575.848,00)	98,46
Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.100.000,00	49.708.547,00	(4.391.453,00)	91,88
Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.500.000,00	39.000.000,00	(500.000,00)	98,73
Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.600.000,00	32.500.000,00	(100.000,00)	99,69
Penyediaan alat tulis kantor	63.000.000,00	62.913.100,00	(86.900,00)	99,86
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00



sepanjang 2018 sebanyak 9 pengaduan telah terselesaikan sebanyak 8 pengaduan dan 1 pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

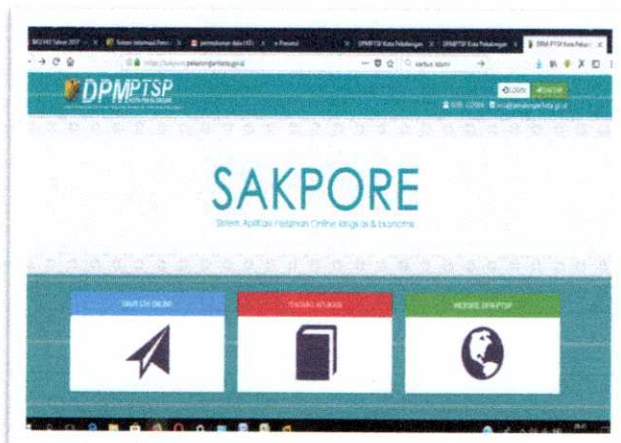


Foto : Dashboard Aplikasi Layanan Perizinan Online



Foto : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Agus Rahardjo Mencoba Aplikasi Layanan Perizinan, Informasi dan Pengaduan Online

### 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	2.365.000,00	(135.000,00)	94,60
Penyediaan makanan dan minuman	29.334.000,00	27.465.000,00	(1.869.000,00)	93,63
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	267.650.000,00	266.906.505,00	(743.495,00)	99,72
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	50.000.000,00	49.250.000,00	(750.000,00)	98,50
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>302.800.000,00</b>	<b>272.182.979,00</b>	<b>(30.617.021,00)</b>	<b>89,89</b>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	16.242.450,00	(8.757.550,00)	64,97
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63.000.000,00	50.500.519,00	(12.499.481,00)	80,16
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	120.000.000,00	118.759.000,00	(1.241.000,00)	98,97
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	74.800.000,00	66.740.010,00	(8.059.990,00)	89,22
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	19.941.000,00	(59.000,00)	99,70
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.976.000,00</b>	<b>(24.000,00)</b>	<b>99,88</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.000.000,00	19.976.000,00	(24.000,00)	99,88
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>37.890.000,00</b>	<b>(2.110.000,00)</b>	<b>94,72</b>
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10.000.000,00	8.760.000,00	(1.240.000,00)	87,60
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.880.000,00	(120.000,00)	98,80
Penyusunan Profil Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.250.000,00	(750.000,00)	92,50
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>	<b>52.807.000,00</b>	<b>52.004.000,00</b>	<b>(803.000,00)</b>	<b>98,48</b>
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	32.807.000,00	32.004.000,00	(803.000,00)	97,55
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>236.700.000,00</b>	<b>235.090.500,00</b>	<b>(1.609.500,00)</b>	<b>99,32</b>
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	64.150.000,00	63.812.500,00	(337.500,00)	99,47
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	80.000.000,00	79.278.000,00	(722.000,00)	99,10
Penyelenggaraan pameran investasi	92.550.000,00	92.000.000,00	(550.000,00)	99,41
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>1.026.550.000,00</b>	<b>1.001.541.570,00</b>	<b>(25.008.430,00)</b>	<b>97,56</b>
Kajian kebijakan penanaman modal	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	100,00
Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	283.600.000,00	279.745.428,00	(3.854.572,00)	98,64
Aplikasi SIMPADU	400.000.000,00	386.595.928,00	(13.404.072,00)	96,65
Pengelolaan Website OSS	23.500.000,00	22.216.214,00	(1.283.786,00)	94,54
Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	40.000.000,00	37.909.000,00	(2.091.000,00)	94,77
Audit Standar ISO 9000	43.500.000,00	43.200.000,00	(300.000,00)	99,31
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	75.000.000,00	73.775.000,00	(1.225.000,00)	98,37
Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	40.500.000,00	38.750.000,00	(1.750.000,00)	95,68
Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan	87.800.000,00	86.700.000,00	(1.100.000,00)	98,75



<b>Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.725.000,00</b>	<b>(275.000,00)</b>	<b>99,39</b>
Penyusunan Profil Investasi	45.000.000,00	44.725.000,00	(275.000,00)	99,39
<b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>134.000.000,00</b>	<b>133.530.000,00</b>	<b>(470.000,00)</b>	<b>99,65</b>
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	134.000.000,00	133.530.000,00	(470.000,00)	99,65

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas manajerial mengenai kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan upaya perbaikan manajemen pemerintahan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai upaya membangun *good governance* dan *result oriented government*. Dengan pemahaman yang tepat mengenai konsep manajemen berbasis kinerja maka pembangunan dan penerapan anggaran berbasis kinerja akan dapat diselenggarakan secara konseptual.

Permasalahan utama dari investasi adalah Keterbatasan lahan untuk membuka usaha baru di Wilayah Kota Pekalongan dan pada tahun 2018 ini adanya Peralihan kewenangan penerapan pemrosesan perizinan dari BKPM ke Kemenko Perekonomian dengan server terpusat melalui One Stop Service belum berjalan secara optimal karena kendala teknis dan aturan pada pemerintah pusat.

Upaya yang sudah dilakukan DPMPTSP untuk pengembangan investasi adalah mengoptimalkan lahan yang sudah ada untuk pengembangan investasi agar lebih berdaya guna dan punya nilai tambah dalam investasi. Dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penerapan kebijakan baru tentang perizinan dan penanaman modal.

LKjIP DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2018 ini diharapkan dapat menunjukkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara konseptual, dengan pengukuran tingkat capaian kinerja seperti yang sudah diuraikan. Dengan mengetahui tingkat capaian kinerja pada Tahun 2018 selanjutnya dapat dilakukan upaya-upaya kongkrit untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan.



Akhir kata semoga LKjIP DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2018 ini dapat berguna bagi DPMP-PTSP sendiri dalam menilai kinerjanya serta guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Pekalongan, Februari 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEKALONGAN

**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPRIONO, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. SAELANY MACHFUDZ, SE  
Jabatan : Walikota Pekalongan

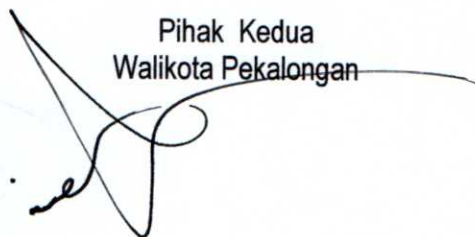
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekalongan,

Pihak Kedua  
Walikota Pekalongan



H. M. SAELANY MACHFUDZ, SE

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, MM  
NIP. 19661008 199203 1 010




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan layanan perizinan usaha atau meningkatnya investasi	Persentase capaian nilai investasi sebesar 1.188,53 milyar rupiah pada tahun 2021  (dalam milyar rupiah)	83,44%  ----- 991,76

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	556.084.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	302.800.000
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	20.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	40.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp	52.807.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	236.700.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	1.026.550.000
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Rp	45.000.000
Program peningkatan pendapatan daerah	Rp	134.000.000
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>2.413.941.000</b>

Walikota Pekalongan



H. M. SAELANY MACHFUDZ, SE

Pekalongan,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, MM

NIP. 19661008 199203 1 010

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2018  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan layanan perizinan usaha atau meningkatnya investasi	Persentase capaian nilai investasi sebesar 1.188,53 milyar rupiah pada tahun 2021  (dalam milyar rupiah)	77,93%  ----- 991,75

Pekalongan, September 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, MM  
NIP. 19661008 199203 1 010